

KEPENTINGAN AUSTRALIA MENJUAL URANIUM KE INDIA TAHUN 2011

Oleh :

Azahari Syafril

Email : ghoz_sunrise@yahoo.co.id

Pembimbing : Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi : 12 Buku, 7 Jurnal, 15 Website, 14 Publikasi Pemerintah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

ABSTRACT

This research is purposed to examine carefully the main interest of Australia from uranium selling to India in 2011. Also describe the benefit from this bilateral cooperation for the both country. The reasons which prompted Australia to cooperate with India and the benefits to be gained by Australia. The study also will explain the process from the beginning and cooperative relations between Australia and India on uranium's selling.

Keywords : National Interest, Export, Bilateral Cooperation, Nuclear Non-Proliferation Treaty.

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kajian ilmu hubungan internasional yang akan menganalisa kepentingan Australia menjual uraniumnya ke India pada tahun 2011. Serta menjelaskan mengenai kepentingan dan manfaat yang didapat oleh Australia melalui kerjasama ekspor uranium dengan India Alasan pemilihan judul ini dikarenakan penulis tertarik dengan hubungan bilateral antara Australia dan India, terutama kerjasama mengenai ekspor bijih uranium.

Pada tahun 2008, pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd membatalkan hubungan kerjasama ekspor uranium ke India dikarenakan India belum menandatangani NPT yang merupakan syarat bagi negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi energi nuklir secara damai, namun pada tahun 2011 Perdana Menteri Julia Gillard mencabut larangan ekspor

uranium tersebut dengan alasan pada tahun 2005 India telah melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam penanganan nuklir dan merumuskan pemisahan program energi nuklir India dari program senjata nuklirnya. Kesepakatan tersebut mendapat persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan India mendapat persetujuan dari 45 anggota Kelompok Negara-negara Penyuplai Nuklir (*Nuclear Suppliers Group*) untuk menjual uranium ke India. Kesepakatan ini sangat penting bagi India, kesepakatan ini akan memperkuat NPT nuklir dan menunjukkan India di bawah perlindungan IAEA, dan mendorong India untuk tidak menandatangani NPT nuklir, karena India telah mendapat persetujuan dari negara-negara penyuplai nuklir, dengan demikian India menerima realitas sebagai negara pengembang program energi nuklir secara damai dan negara pemilik senjata teknologi nuklir, namun program energi

nuklir India diperbolehkan mendapatkan akses uranium dari negara pengeksport uranium.

Penulis menggolongkan kepentingan yang dijalankan Australia dalam membuka hubungan kerjasama ekspor uranium ke India pada tahun 2011 kedalam kategori *World Order Interest*, dimana India menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat setelah Cina, sehingga Australia meyakini India akan menjadi salah satu negara yang memiliki *power* disektor ekonomi, dan dari kerjasama ini hubungan bilateral kedua negara akan semakin erat sehingga dapat menguntungkan Australia dari segi finansial dan juga dari segi perpolitikan dunia. Dalam penelitian ini, kebijakan Australia mengeksport uraniumnya ke India selain untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir secara damai, juga adanya kepentingan Australia untuk menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama bilateral dengan India yang menjadi salah satu raksasa ekonomi Asia.

Pembahasan

Setiap tahun, Australia mengeksport sedikitnya 9.600 ton konsentrat uranium oksida senilai 1,1 miliar dolar Australia (sekitar Rp.12 triliun). Uranium itu dieksport ke AS, China, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, semua dengan syarat ketat tak boleh digunakan untuk keperluan militer¹.

Kerangka kebijakan untuk industri ekspor uranium Australia

¹“Australia pertimbangkan ekspor uranium ke India” terdapat pada <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/15/12422770/Australia.Pertimbangan.Ekspor.Uranium.ke.India>, diakses tanggal 2 April 2014 pukul 23.45 WIB.

terbentuk setelah Australia meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1972. Munculnya Australia sebagai aktor pengeksport dan pemilik tambang uranium terbesar setelah meratifikasi NPT, telah meningkatkan perekonomian negara tersebut pada tahun 1970-an. Pada tahun 1977, Perdana Menteri Malcolm Fraser merumuskan kebijakan jangka panjang nasional, dimana Australia harus mengeksport uraniumnya untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir secara damai, dan tidak akan memberikan kontribusi pada produksi senjata nuklir atau tujuan militer lainnya, ini sesuai dengan Pasal IV dari NPT yang telah diratifikasi oleh Australia. Negara-negara yang ingin mengimpor uranium dari Australia maupun negara penghasil uranium, harus terlebih dahulu telah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, agar mendapat persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk pengembangan energi nuklir.²

Pada tahun 1977 Australia membentuk kebijakan ekspor uranium, dimana uranium yang dieksport hanya kepada anggota-anggota negara yang telah meratifikasi NPT. Bagi negara-negara yang penggunaan uraniumnya tidak untuk persenjataan, maka negara tersebut harus memenuhi standar penggunaan sipil dari IAEA serta berada dibawah pengawasan langsung dari IAEA. Sedangkan negara-negara yang menggunakan teknologi nuklir untuk persenjataan diberikan keterbatasan dalam pembelian material bahan baku nuklir, serta hanya boleh dipergunakan untuk perdamaian. Adapun bentuk

² Rory Medclaf, “Australia’s uranium puzzle: Why China and Russia but not India?”, Spring 2011: Vol. 1 (Melbourne: Australia India Institute, 2011), hlm. 4

kebijakan ekspor uranium Australia yang dibentuk pada tahun 1977 yaitu:³

1. Uranium Australia hanya diperbolehkan diekspor dengan tujuan penggunaan untuk perdamaian tanpa adanya tujuan untuk menjadi bahan peledak dan harus berada di bawah perjanjian perlindungan bilateral antara Australia dan negara yang ingin membeli uranium Australia dengan ketentuan:
 1. Adanya jaminan pengawasan perlindungan dari IAEA.
 2. Adanya persetujuan dari Australia dalam hal pemindahan uranium yang telah dibeli kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk memperkaya ataupun pemrosesan ulang uranium, dan
 3. Adanya pengawasan fisik.
2. Australia memiliki hak untuk memutuskan negara mana saja yang sudah siap untuk melakukan perjanjian perlindungan sebelum dilakukannya kegiatan ekspor uranium.
3. Negara-negara yang menggunakan teknologi nuklir untuk sipil harus sudah meratifikasi NPT dan berada dalam pengawasan langsung dari IAEA.
4. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir harus

memberikan jaminan agar uranium Australia tidak dipergunakan untuk perdamaian ataupun dipergunakan sebagai bahan peledak serta uranium Australia berada dibawah perlindungan langsung dari IAEA.

5. Kontrak komersil untuk ekspor uranium Australia harus ada tertuang dalam perjanjian perlindungan dan keamanan bilateral antara Australia dan negara yang ingin membeli uranium Australia.
6. Pemerintah Australia telah memperketat ekspor uraniumnya dengan membuat beberapa protokol tambahan dengan IAEA, seperti halnya memperketat perlindungan uranium Australia yang berada disemua negara.

Hubungan kerjasama uranium Australia dan India diawali pada tahun 2006 ketika Perdana Menteri John Howard dari Australia mengambil pendekatan pragmatis untuk memperluas ekspor uranium Australia. Hal ini sejalan dengan perubahan peluang pasar internasional, kebangkitan dirasakan ketika kepentingan global dalam energi nuklir, dan rasa kepentingan nasional Australia dalam budidaya hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara penting.

Di tahun 2007, Australia bergabung dengan beberapa negara lain untuk mengantisipasi penjualan uranium kepada India yang merupakan negara yang memiliki persenjataan nuklir namun belum meratifikasi NPT dari *Nuclear Suppliers Group (NSG)* yang memberikan izin untuk menjual uranium ke India. Pada tahun itu, pemerintahan Perdana Menteri Australia John Howard memberikan pengecualian terhadap India. Pemerintahan Howard beranggapan bahwa India termasuk dalam kebijakan jangka panjang

³Talitha Dowds & Sharon Squassoni, “*The Last Domino to Fall: Australia, Uranium, and India Deal*”, Center For Strategic & International Studies, 2012, terdapat pada <http://csis.org/publication/last-domino-fall-australia-uranium-and-india-deal>, diakses tanggal 21 November 2013 pukul 09.30 WIB.

Australia yang membutuhkan pengawasan penuh dalam pasokan nuklir.

“India’s democratic government, growing regional power, rising energy needs and ‘strong non-proliferation record’, as well as global environmental challenges, and Australia’s desire to strengthen bilateral relations with India as reasons for changing Australia’s uranium export policy.”⁴

Pemerintahan Howard beranggapan bahwa India merupakan negara berkembang yang membutuhkan pasokan energi, dan India memiliki sejarah penggunaan teknologi nuklir sipil yang kuat, serta Australia ingin mempererat hubungan bilateralnya dengan India sehingga Pemerintahan Howard akan mengubah kebijakan ekspor uranium Australia untuk India.

Namun pada masa pemerintahan Kevin Rudd, Australia menolak melakukan kerjasama ekspor uranium ke India dikarenakan India tidak menandatangani NPT, sehingga menurut PM Rudd Australia tidak akan menjual uraniumnya kepada negara yang tidak menandatangani NPT. PM Rudd mengatakan:⁵

“I believe we’ve got no alternative but to do that [reverse the Howard government’s decision to approve uranium sales to India]. I realise that’s a

⁴ *Ibid.*

⁵ Jim Green, *Uranium, India And The Fracturing Nuclear Non-Proliferation Regime*, EnergyScience Coalition Briefing Paper No. 18 (revised), 2010, hal. 2.

very difficult thing to do, but we have a principle when it comes to this country’s foreign policy engagement with the world which is this: We respect the Nuclear Non-Proliferation Treaty and the International Atomic Energy Agency because we’ve got to prevent nuclear weapons proliferation in our own region, in our own neighbourhood and our own backyard. No one in Australia wants a nuclear arms race aided by us in the Indian sub-continent or between India and China because we’ve failed to properly ensure the upholding of the NPT and the IAEA safeguards regime under it.”

Dari pernyataan Rudd tersebut, sudah sangat jelas bahwa Rudd tidak akan menjual uranium Australia kepada negara-negara yang tidak menandatangani NPT demi keamanan dan kestabilan wilayah, namun PM Rudd berjanji akan membantu India dalam program nuklirnya melalui Nuclear Suppliers Group, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari negara-negara pemasok nuklir.⁶

Pada Desember 2011, di bawah kepemimpinan PM Julia Gillard, Australia mencabut larangan penjualan uranium ke India. Keputusan itu diambil melalui proses pemungutan suara yang dilakukan pada konferensi Partai Buruh

⁶ *“Kevin Rudd Refuses to Buckle on Refusal to Sell Uranium to India”*, terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/kevin-rudd-refuses-to-buckle-on-refusal-to-sell-uranium-to-india/story-e6frgczf-1225797003668> , diakses tanggal 3 April 2014 pada pukul 14.00 WIB.

Australia. Sebanyak 206 suara anggota Partai Buruh mendukung kebijakan tersebut, sementara 185 suara menolak⁷. Sesaat setelah keputusan untuk pencabutan larangan ekspor uranium ke India ini dikeluarkan, Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan keputusan ini didasari atas kepentingan nasional, dan juga Australia akan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan kerjasama ini.

Dalam penjelasannya Gillard mengatakan penjualan uranium kepada India akan disertai dengan aturan ketat agar uranium itu digunakan untuk kepentingan sipil dan bukan untuk pengembangan senjata. Pernyataan Partai Buruh ini mendapat dukungan dari kalangan industri uranium Australia. Namun bagi kalangan yang menentang antara lain Menteri Transportasi Anthony Albanese menilai keputusan itu sebagai langkah yang tidak tepat. Dia mengatakan sejak peristiwa kerusakan reaktor nuklir di Fukushima, Jepang akibat tsunami banyak negara seperti Jerman, Swiss dan Italia mulai mengurangi penggunaan energi nuklir.

Keputusan untuk membuka kerjasama penjualan uranium ke India juga tidak ditentang oleh Perdana Menteri Australia yang baru terpilih pada September 2013 lalu, Tony Abbot. Meski pemerintahan Australia dipegang oleh Partai Liberal yang merupakan oposisi dari Partai Buruh yang memegang pemerintahan sebelumnya, tidak mempengaruhi keputusan mantan PM Julia Gillard yang mencabut larangan penjualan uranium ke India. Menurut PM Abbott, Australia dan India

⁷ "Australia Cabut Larangan Ekspor Uranium ke India" terdapat pada <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/04/120369807/Australia-Cabut-Larangan-Ekspor-Uranium-ke-India>, diakses tanggal 3 April 2014 pukul 23.45 WIB

memiliki hubungan yang sangat dekat mengenai isu-isu keamanan dan strategis, dan oleh karena itu PM Abbott akan terus menjaga dan menghormati hubungan bilateral kedua negara⁸.

Hubungan Diplomatik Australia dan India.

Australia dan India merupakan dua negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara *mid-level powers*, kedekatan hubungan kedua negara ini sudah terjalin sejak tahun 1940-an baik dalam hubungan politik, ekonomi, dan pertahanan. Australia dan India juga berbagi nilai-nilai demokrasi dan memiliki lembaga-lembaga demokrasi yang kuat. Hubungan antara kedua negara juga meluas ke migrasi penduduk, hingga pertukaran budaya.

Hubungan Australia dan India sudah di mulai sejak abad ke-18, ketika India memiliki peran penting dalam memberikan pasokan pangan bagi koloni muda yang ada di Australia, dan perdagangan menjadi kunci penting bagi VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang ada di Bengal, India. Pada tahun 1792 kapal *Guardian* yang membawa pasokan makanan untuk koloni yang ada di Australia tenggelam, insiden ini mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan makanan koloni. Gubernur VOC yang ada di Bengal India dengan segera mengirimkan bantuan persediaan makanan melalui kapal *Atlantic* untuk koloni-koloni kelaparan yang ada di Australia.⁹

⁸"No change in decision to supply uranium to India – The Asian Age", terdapat pada <http://www.asianage.com/india/no-change-decision-supply-uranium-india-097>, diakses tanggal 22 Mei 2014 pukul 19.30 WIB.

⁹ "India-Australia Relations", The High Commission of India in Australia, terdapat pada http://www.hcindia-au.org/india_australia.html, diakses tanggal 11 Mei 2014 pukul 18.00 WIB.

Pada periode Perang Dingin, masing-masing Australia dan India berpihak kepada kedua kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika pada masa ini hubungan Australia dan India menjadi dingin, dikarenakan partisipasi kedua negara yang turut mendukung Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun India tergabung dalam negara-negara non-blok, adanya dukungan dari Uni Soviet dalam konflik yang terjadi antara India dan Pakistan di tahun 1970-an membuat India secara tidak langsung lebih condong memihak Uni Soviet. Meskipun adanya dukungan Uni Soviet kepada India, Australia tidak membuat kebijakan luar negeri terpisah terhadap India, ini dikarenakan Australia hanya beranggapan bahwa India hanyalah negara biasa yang berada dikawasan Samudra Hindia dan kedua negara hanya melakukan kontak hubungan diplomatik umum saja pada periode Perang Dingin.¹⁰

Bagi kedua negara, kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis penting dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Cina. Sepertihalnya dengan Australia yang telah lama bersekutu dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat, namun Australia juga perlu menyeimbangkan hubungannya dengan Cina yang merupakan salah satu *partner* perdagangan terbesarnya. Begitu juga dengan India, meskipun India memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, namun hubungan ekonomi dengan Cina juga menjadi faktor kunci

yang mempengaruhi hubungan India dengan Amerika Serikat.¹¹

Sejak mengadopsi kebijakan ekonomi liberal dua dekade lalu, India telah menjadi salah satu dari dua negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia setelah Cina. India telah mengembangkan hubungannya hingga ke kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta melakukan ekspansi ke kawasan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan bilateral Australia dan India telah menghasilkan keuntungan bagi kedua negara, sepertihalnya hubungan perdagangan yang didorong oleh faktor untuk saling melengkapi kebutuhan antara kedua negara. Perdagangan dua arah yang dilakukan Australia dan India telah mengalami pertumbuhan dari 3,3 milyar USD pada tahun 2000, hingga menjadi lebih dari 17,4 milyar USD pada tahun 2012¹². Dengan jumlah penduduk hingga lebih dari 1 milyar jiwa, India menjadi salah satu pangsa pasar terbesar di dunia, dan ini menjadi peluang bagi Australia untuk menjadi rekan bisnis khususnya disektor pertanian, energi, manufaktur, pertambangan, dan jasa.

Australia telah menempatkan India di peringkat depan dalam posisinya sebagai mitra kerjasama internasional. Kedua Pemerintah mengakui ada potensi yang signifikan untuk kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang dan pada tahun 2009 sepakat untuk mengkategorikan hubungan

¹⁰ Zhao Qinghai, "Australia-India Relations: A Strategic Partnership Yet to Mature", CIIS, 2012, terdapat pada http://www.ciis.org.cn/english/2012-10/30/content_5447985.htm, diakses tanggal 3 Februari 2014 pada pukul 21.00 WIB.

¹¹ Amitabh Mattoo & Souresh Roy, "India-Australia Relations in the Asian Century: Perspectives from India and Australia", Manohar, New Delhi.

¹² "Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement negotiations", Australian government: Department of Foreign Affairs and Trade, terdapat pada <http://www.dfat.gov.au/fta/aifta/>, diakses tanggal 1 Februari 2014, pukul 17.00 WIB.

sebagai kemitraan strategis (*Strategic Partnership*).¹³

Pada tanggal 12 Mei 2011, Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson dan Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma, secara resmi melakukan negosiasi mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (*Economic Cooperation Agreement*) antara Australia dan India yang mencakup investasi dan perdagangan barang dan jasa. Perdana Menteri Singh dan Perdana Menteri Gillard menegaskan kembali untuk mencapai kesepakatan yang berkualitas tinggi selama kunjungan Perdana Menteri Julia Gillard ke India pada 15 hingga 17 Oktober 2012. Australia akan mencari kesepakatan yang benar-benar komprehensif dan konsisten dengan kebijakan perdagangan pemerintah Australia mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*).¹⁴

Keuntungan Utama dan Keuntungan dari Perjanjian ini antara lain¹⁵:

1. Sebuah perjanjian yang komprehensif akan membantu dalam memperluas basis perdagangan barang dengan mengatasi hambatan tarif dan belakang pembatasan perbatasan pada perdagangan barang.
2. Ada potensi signifikan untuk memperluas perdagangan jasa antara India dan Australia. FTA dapat memfasilitasi pertumbuhan perdagangan jasa

¹³ "India Country Brief", Australian government: Department of Foreign Affairs and Trade, terdapat pada http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html, diakses tanggal 1 Februari 2014 pukul 17.00 WIB.

¹⁴ *Op Cit*, "Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement negotiations"

¹⁵ *Ibid*.

dengan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pemasok jasa Australia dan dengan meningkatkan transparansi regulasi.

3. Sebuah FTA dapat memfasilitasi dan mendorong investasi dengan mengurangi hambatan, meningkatkan transparansi dan meningkatkan perlindungan investasi.

Hubungan bilateral Australia dan India tidak hanya dibidang ekonomi dan politik saja, namun juga dibidang pendidikan dan institusi pemerintahan. Australia merupakan tujuan utama bagi mahasiswa India yang ingin belajar di luar negeri. Hingga akhir Maret 2012, ada 37.400 mahasiswa India yang belajar di Australia sehingga India menjadi negara terbesar kedua yang mengirim mahasiswanya ke Australia setelah Cina. Pemerintah Australia telah menjamin keselamatan semua siswa internasional yang belajar di Australia, dan langkah pemerintah Australia ini telah mendapat apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah India. *The Australia-India Council* (AIC) didirikan pada tahun 1992 oleh Pemerintah Australia untuk memperluas hubungan bilateral melalui peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman antara masyarakat dan lembaga-lembaga Australia dan India. AIC terdiri dari dewan anggota dengan kepentingan dalam hubungan Australia-India, yang terdiri dari sekumpulan masyarakat Australia. AIC memiliki sekretariat yang terletak di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan di Canberra, serta Komisi Tinggi Australia di New Delhi mengelola kegiatan AIC di India.¹⁶

Australia - India Strategic Partnership

Pada masa pemerintahan Kevin Rudd, Australia mendeklarasikan ambisinya untuk meningkatkan hubungan Australia dengan India ke tahap yang lebih serius melalui

¹⁶ *Op Cit*, "India Country Brief"

Australia's Strategic Relationship. Wacana tersebut menandakan adanya kepentingan Australia untuk mengambil keuntungan jangka panjang dari keterdekatan hubungannya dengan India. Dengan meningkatnya hubungan kedua negara, Australia berharap terjadinya pertumbuhan dari sektor ekonomi dan politik. Sumber daya energi Australia menjadi kunci penting dari hubungan kedua negara dikarenakan India merupakan pembeli emas dan tembaga Australia terbesar dan juga tujuan ekspor batu bara dan wool terbesar kedua bagi Australia dengan nilai perdagangan mencapai 3,192 milyar dollar Australia pada tahun 2011.¹⁷

Dari sektor keamanan, kedua negara mendeklarasikan kerjasama dalam beberapa bidang seperti halnya pertukaran informasi, kerjasama pertahanan, kerjasama dalam upaya memerangi terorisme, penanggulangan bencana alam, peningkatan keamanan udara dan laut, serta beberapa mekanisme-mekanisme yang dapat meningkatkan keamanan kedua negara.¹⁸

Ada 5 faktor utama dibentuknya *Australia-India Strategic Partnership* ini, yaitu:¹⁹

1. Adanya banyak kesamaan antara kedua negara sehingga menjadi dasar pondasi dari hubungan bilateral ini. Australia dan India merupakan sama-sama negara persemakmuran Inggris (*British Commonwealth*) sehingga kedua negara ini memiliki kesamaan nilai-nilai ideologi politik dan pemerintahan.
2. Adanya kepentingan ekonomi antara kedua negara. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan energi dan mineral

negara India, menjadikan negara tersebut sebagai tujuan ekspor bagi para eksportir Australia sehingga Australia memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi India.

3. Kedua negara membutuhkan peningkatan dalam bidang strategi dan keamanan. Australia dan India melihat kerjasama keamanan sangat diperlukan karena sepertiga jalur transportasi perdagangan Australia melewati Samudra Hindia, sehingga Australia membutuhkan bantuan dari India dalam meningkatkan keamanan di Samudra Hindia, karna India memiliki angkatan laut terkuat jika dibandingkan oleh beberapa negara sepanjang Samudra Hindia, serta dari kerjasama ini kedua negara dapat meningkatkan keamanannya dalam memerangi terorisme.
4. Adanya negara Cina yang merupakan raksasa Asia juga menjadi faktor penting mengapa Australia dan India sepakat meningkatkan hubungan bilateralnya ke tingkat yang lebih tinggi. Australia dan India merasa tidak nyaman dengan peningkatan angkatan laut Cina saat ini, sehingga menimbulkan *security dilemma* bagi beberapa negara dikawasan Asia-Pasifik. Olehkarna itu, Australia dan India membutuhkan peningkatan kekuatan militer demi meredam ancaman dari Cina.
5. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam hubungan Australia dan India, dimana AS membutuhkan sekutu di kawasan Asia-Pasifik untuk meredam kekuatan Cina yang terus berkembang dan India merupakan salah satu *partner* AS di Asia. AS adalah negara pertama yang menandatangani

¹⁷ *Op Cit*, Zhao Qinghai

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

perjanjian kerjasama penggunaan energi nuklir untuk sipil (*Civilian Nuclear Cooperation Agreement*) dengan India. Pada tahun 2011, AS, Australia, dan India sepakat untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan keamanan maritim. Pada saat itu juga, Presiden Barack Obama meyakinkan Perdana Menteri Julia Gillard untuk mencabut larangan ekspor uranium Australia ke India, agar kerjasama trilateral dalam sektor kewanitaan dapat berjalan dengan lancar.

Kebutuhan Pasokan Energi India

India adalah sebuah negara Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan terletak di wilayah Asia Selatan. India merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia setelah Cina, dan juga merupakan salah satu negara yang berhasil bertahan dari krisis ekonomi global pada tahun 2008 – 2009 dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen²⁰. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 milyar jiwa, maka tidak heran India membutuhkan pasokan energi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya maupun untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Oleh karena itu, India menggunakan teknologi nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Penggunaan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik telah memenuhi 2,2% dari total keseluruhan kebutuhan energi tahunan dari negara

²⁰ KBRI New Delhi, India, terdapat pada <http://www.kemlu.go.id/newdelhi/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=2&l=id> diakses tanggal 20 April 2014 pukul 23.45 WIB.

India, dan apabila seluruh reaktor nuklir India telah siap beroperasi, maka pemanfaatan teknologi nuklir sebagai sumber energi akan menyuplai kebutuhan energi India sebesar 7% dari total kebutuhan energi tiap tahunnya pada tahun 2020.²¹

Terbatasnya pasokan uranium menjadi penghalang utama India untuk melaksanakan proyek peningkatan sumber energi tersebut, ini dikarenakan tidak banyaknya negara-negara penghasil uranium yang mengeksport uraniumnya ke India, dikarenakan dampak dari India tidak menandatangani NPT. Program India untuk pemanfaatan energi nuklir yang damai dipengaruhi oleh praktek-praktek perdagangan dan embargo unilateral pada pasokan nuklir oleh beberapa negara. Selain itu, dengan adanya ketidakpercayaan politik dan diskriminasi oleh negara-negara pengeksport uranium menjadikan adanya kendala bagi India dalam memperoleh bahan dasar untuk energi nuklir²². Sehingga India membutuhkan persetujuan pengamanan oleh pengawas nuklir PBB, IAEA, dan ratifikasi perjanjian kerjasama nuklir dengan Amerika Serikat.

Dengan dibukanya kerjasama penjualan uranium dengan Australia, maka India dapat merealisasikan rencana pengembangan penggunaan energi nuklirnya. Dari kerjasama tersebut, India akan dapat menghasilkan energi hingga 20 gigawatt untuk membantu kebutuhan pasokan energi dari sektor manapun pada tahun 2020 dan 200 gigawatt ditahun 2050.²³

Dari kerjasama penjualan uranium tersebut, akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi

²¹ *Op Cit*, Jim Green, hal. 24

²² Dr.H.N.Sethna “*India’s Atomic Energy Programme – Past and Future*”, IAEA Bulletin – Vol 21, NO. 5.

²³ *Ibid*, hal. 25

Australia. Para ahli telah membuat kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh Australia dari penjualan uraniumnya ke India, yakni:²⁴

1. Jika Australia memasok 20% dari total uranium yang dibutuhkan oleh India, maka ekspor uranium Australia akan meningkat hingga 1,8% dari total ekspor uranium Australia pada tahun 2008 hingga 2009.
2. Apabila seluruh reaktor nuklir India yang sedang dalam tahap pembangunan siap untuk beroperasi, maka ekspor uranium Australia akan meningkat mencapai 10% dari total ekspor uranium Australia ditahun 2008 dan 2009, dan angka tersebut akan terus mengalami peningkatan ditahun 2030.

Nilai Strategis India Bagi Australia

Kerjasama penjualan uranium ke India menjadi suatu peluang besar bagi Pemerintah Australia untuk meningkatkan perekonomian Australia dan juga mempererat hubungan kemitraan strategis antara India dan Australia melalui *Australia-India Strategic Partnerships*. Selain itu, kerjasama tersebut menjadi jembatan bagi Australia untuk memperkuat posisinya dikawasan Indo-Pasifik dan juga wilayah Samudra Hindia. Bagi kedua Negara, kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang strategis, dan oleh karna itu membangun hubungan politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan juga Samudra Hindia sangatlah diperlukan.

Australia dan India juga tergabung dalam keanggotaan *The Indian Ocean Rim Association*, Forum Regional ASEAN, *East Asia Summit*, dan negara-negara G20, yang mana memiliki kesamaan visi dalam menghadapi isu-isu permasalahan

regional maupun Internasional. Dari beberapa kesamaan tersebut, telah membantu kedua negara untuk mengembangkan hubungan kerjasama mereka. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor kedekatan Australia dan India. Ahli-ahli dari kedua negara berpendapat bahwa hubungan Australia dan India sebaiknya tidak disektor politik saja, namun juga mencakup sektor ekonomi dan perdagangan. Alasan tersebut dikarenakan para ahli dari kedua negara berpendapat, dengan tingkat populasi penduduk dan perekonomian India yang terus tumbuh dan berkembang, maka India membutuhkan persediaan energi dan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Menurut perkiraan OECD, dalam kurun waktu 30 tahun jumlah penduduk tingkat menengah India akan mencapai 1 milyar jiwa, atau 90% dari jumlah penduduk India pada tahun 2039.²⁵

Dengan semakin eratnya hubungan Australia dengan India, kedua negara akan saling mendapatkan keuntungan, tidak hanya dari sektor ekonomi saja namun juga dari sektor keamanan. Sepertiga dari Zona Ekonomi Eksklusif Australia terletak di wilayah Samudra Hindia, dan sebagian besar ekspor hasil tambang Australia seperti batu bara, bijih besi, gas alam cair, dan sumber daya mineral lainnya diangkut melalui Samudra Hindia. Akibatnya Australia sangat peduli dengan memastikan keamanan maritim di wilayah Samudra Hindia, dan India yang merupakan salah satu dari anggota negara-negara *Indian Ocean Rim* memiliki kekuatan angkatan laut paling kuat diantara negara-negara anggota *Indian Ocean Rim* lainnya. Dengan mempererat hubungan Australia dengan India, Australia dapat menjaga keamanan wilayah lautnya dari tindak terorisme, dan peran India sebagai anggota *The Indian Ocean Rim*

²⁴ *Ibid*, hal.28

²⁵ *Op Cit*, Zhao Qinghai

Association meningkat dan sangat terbantu dengan adanya kerjasama keamanan maritim dengan Australia.²⁶

Keuntungan Australia Dari Kerjasama Penjualan Uranium Dengan India.

Keputusan pemerintah Australia mengeksport uranium ke India bukan hanya berlandaskan keuntungan ekonomi maupun isu penggunaan nuklir sipil India saja, namun keputusan Australia ini perlu dipahami dari beberapa faktor seperti halnya: rezim NPT, faktor-faktor politik dalam negeri seperti opini publik, hubungan bilateral antara kedua negara, dinamika geopolitik dan strategis antara Australia dan India, norma-norma internasional dari non-proliferasi, dan juga pertimbangan pasar internasional.

Biasanya, ada beberapa pertimbangan pemerintah Australia mengenai ekspor uranium berdasarkan aturan dari rezim NPT, seperti adanya pengesahan dari rezim NPT dan badan pengamanan nuklir dari IAEA kepada negara tujuan ekspor uranium yaitu berupa riwayat penggunaan energi nuklir suatu negara sehingga dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Dengan pengesahan NPT dan adanya pengamanan dari IAEA, akan mempengaruhi keputusan Australia untuk mengeksport uraniumnya serta mengurangi resiko penggunaan uranium Australia untuk program senjata dari negara tujuan ekspor.

Berbeda dengan kasus India. Negara ini belum meratifikasi NPT dan sepertinya tidak ada harapan serius India untuk menandatangani. Dengan adanya kerjasama penjualan uranium ke India, Australia akan dianggap “diskriminasi pembeli” oleh komunitas internasional dikarenakan *record* India sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Pada tahun 1974, India

²⁶ *Op Cit*, Zhao Qinghai

melakukan pengujian senjata nuklir dan pemerintah India mengatakan bahwa tes tersebut bertujuan untuk penggunaan teknologi nuklir untuk perdamaian, dan pada tahun 1998 India melakukan lima tes senjata nuklir secara terbuka. Meskipun banyaknya tuntutan dari komunitas internasional supaya India bergabung dengan rezim NPT agar negara tersebut menjadi negara non-senjata nuklir, namun tindakan tersebut sangat mustahil dilakukan India tanpa melepaskan gudang persenjataannya dan hal itu akan menjadi kemunduran bagi India, mengingat lingkungan India yang berbahaya meliputi Pakistan dan Cina yang bersenjata nuklir.²⁷

Faktor Ekonomi

Faktor keuntungan ekonomi dari kerjasama ini sangat kecil. Ekspor uranium Australia merupakan industri miliaran dolar, bahkan proyeksi pendapatan Australia dari ekspor uranium ditahun 2014 diperkirakan \$1,7 milyar (AUD), hasil ini sangat jauh apabila dibandingkan dengan pendapatan dari ekspor bijih besi yang mencapai \$63 milyar (AUD) di tahun 2011. Sementara itu, perusahaan pertambangan jelas akan mendapatkan keuntungan dengan adanya pembukaan pasar ekspor baru. Industri uranium Australia juga memiliki peran dalam pelobian dengan pemerintah dalam perubahan kebijakan ekspor Australia. Kelompok Asosiasi Uranium Australia (*Australian Uranium Association*) melihat kebijakan ekspor uranium Australia ke India sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis dan kelompok ini juga mendukung rezim NPT.²⁸

²⁷ *Op Cit*, Rory Medclaf

²⁸ Australian Uranium Association, ‘*Facts about the uranium industry*’, terdapat pada <http://www.auran.org.au/Content/Keyindustryfacts.aspx>, diakses tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.30 WIB.

Meskipun kebijakan tersebut sering mendapat tentangan dari gerakan anti-nuklir bahwa keputusan ekspor uranium Australia tersebut sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keserakahan korporasi. Satu-satunya pertimbangan pasar yang dapat mempengaruhi secara substansial pada pengambilan keputusan pemerintah tampaknya akan menjadi suatu kehilangan pangsa pasar bagi negara-negara pemasok uranium lainnya dalam jangka panjang.

Faktor Hubungan Diplomatik

Kedekatan hubungan Australia dan India dapat menjadi salah satu faktor keputusan Australia membuka pasar ekspor uranium ke India. Keputusan pemerintah Australia untuk menjual uranium ke India pada prinsipnya sangat jelas dilakukan untuk kepentingan nasional Australia dengan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dan tekad untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara menjadi kunci dalam kepentingan nasional tersebut.

Kepentingan nasional antara hubungan bilateral Australia-India memiliki pengaruh besar dalam keputusan pemerintah untuk menjual uranium ke India, dan keputusan ini akan memantapkan Australia sebagai negara pemasok uranium yang menjual uraniumnya kepada negara yang tidak meratifikasi NPT (India), dimana dalam beberapa dekade ini Australia tidak pernah menjual uranium kepada negara-negara non-NPT.

Pada masa pemerintahan P.M John Howard, hubungan bilateral Australia-India telah menjadi kekecewaan bagi kedua negara. Meskipun kedua negara memiliki kesamaan letak geografi di Samudra Hindia dan kesamaan nilai-nilai demokrasi, Canberra dan New Delhi telah lama gagal dalam memperlakukan satu sama lain sebagai mitra strategis

yang serius, meski India merupakan Importir sumberdaya alam terbesar Australia namun hubungan kedua negara tetap biasa-biasa saja, kemudian Perdana Menteri John Howard melihat uranium sebagai kunci untuk menjadikan Australia sebagai mitra diplomatik utama India.

Banyak negara-negara yang mencoba mendekati India setelah melihat pertumbuhan India yang sangat pesat, hal ini tidak di sia-siakan oleh Australia. Agar Australia bisa mendapatkan perhatian dari India, Australia harus memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan negara tersebut kepada India, dan uranium menjadi kunci utama agar India memberikan perhatiannya kepada India. Ini sesuai dengan yang disampaikan Perdana Menteri India Manmohan Singh secara blak-blakan kepada Perdana menteri John Howard pada tahun 2006.²⁹ Meskipun demikian, hubungan bilateral saja tidak bisa sepenuhnya menjelaskan keputusan Howard. Keinginannya untuk memajukan hubungan Australia-India sulit untuk dipisahkan dari dua hal yaitu pengakuan terhadap India sebagai kekuatan utama, dan keinginan memperkuat upaya Amerika Serikat untuk membawa India ke dalam arus utama nuklir global serta membangun kemitraan strategis dengan India.

Australia Ingin Menjadi Aktor Tunggal Dalam Penjualan Uranium

Keputusan Australia menjual uranium ke India membuat beberapa negara besar yang memiliki persenjataan nuklir di sekitar India seperti Cina dan Rusia menjadi was-was, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara substansial oleh Australia. Keputusan Australia ini akan mengubah dinamika geopolitik dan strategi beberapa negara, namun keputusan tersebut berkaitan dengan perubahan keseimbangan kekuatan di

²⁹ *Op Cit*, Rory Medclaf

Asia dan adanya peran sentral dari Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan Australia. Menjadi jelas bahwa adanya pengaruh Amerika Serikat dalam keputusan Australia menjual uraniumnya ke India, meskipun agak terlambat bagi Australia untuk merangkul India sebagai mitra strategisnya. Namun dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat dapat membantu agenda-agenda Australia untuk mempererat hubungannya dengan India sebagai mitra keamanan yang menurut Australia saat ini adalah abadinya Asia, termasuk didalamnya hubungan pertahanan yang melibatkan India dan Jepang. Pada bulan Agustus 2007, John Howard mendukung India sebagai penerima uranium Australia di tengah-tengah pertempuran politik dan birokrasi yang mengancam akan menunda kesepakatan India-AS di Washington. Dengan kata lain, salah satu konsekuensi dari perubahan kebijakan Australia akan memberikan amunisi politik untuk pendukung kesepakatan India-AS disaat yang kritis.

³⁰

Dibawah pemerintahan Partai Buruh, Australia yang juga tergabung bersama kelompok Negara Pemasok Nuklir (NSG) mengajak seluruh anggota NSG untuk ikut serta mendukung program nuklir sipil India, dan dengan demikian akan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengekspor uranium secara legal ke India. Pada saat yang sama pemerintahan Partai Buruh berupaya mencegah India untuk mengimpor uranium selain dari Australia, agar Australia menjadi pemegang tunggal pasar uranium di India.

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan penulisan diatas, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai

kepentingan Australia menjual uraniumnya ke India pada tahun 2011. Australia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dimana Ratu Elizabeth II menjabat sebagai Kepala Negara yang secara resmi diwakili oleh Gubernur Jenderal. Negara penghasil uranium terbesar ketiga di dunia ini memiliki jumlah penduduk mencapai 23.278.119 jiwa dan menjadi negara terbesar keenam di dunia serta memiliki keterdekatan khusus dengan Negara India. Hubungan keterdekatan Australia dan India telah lama terjalin, jauh sebelum masa kemerdekaan kedua negara tersebut dan kini hubungan kedua negara tersebut semakin erat melalui kerjasama baik bilateral maupun regional.

Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard pada tahun 2011, Australia mencabut larangan ekspor uraniumnya ke India. Keputusan PM Julia Gillard ini memunculkan pro dan kontra di komunitas internasional, ini dikarenakan status India yang tidak menandatangani *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yaitu suatu rezim internasional yang ditujukan kepada negara-negara yang hendak menggunakan teknologi nuklir hanya untuk kepentingan sipil saja dan tidak diperbolehkan untuk kegunaan persenjataan. Keputusan PM Julia Gillard ini berlandaskan pada kepentingan nasional Australia. Adapun keuntungan Australia dari penjualan uraniumnya ke India yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian Australia. Dengan jumlah penduduk India yang mencapai lebih dari 1 milyar jiwa, maka tidak heran India membutuhkan pasokan energi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya maupun untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Oleh karna itu, India menggunakan

³⁰ *Ibid*, Rory Medclaf

teknologi nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga India merupakan pasar baru bagi ekspor uranium Australia.

2. Dari kerjasama penjualan uranium tersebut, akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Australia. Para ahli telah membuat kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh Australia dari penjualan uraniumnya ke India, yakni:

1. Jika Australia memasok 20% dari total uranium yang dibutuhkan oleh India, maka ekspor uranium Australia akan meningkat hingga 1,8% dari total ekspor uranium Australia pada tahun 2008 hingga 2009.

2. Apabila seluruh reaktor nuklir India yang sedang dalam tahap pembangunan siap untuk beroperasi, maka ekspor uranium Australia akan meningkat mencapai 10% dari total ekspor uranium Australia ditahun 2008 dan 2009, dan angka tersebut akan terus mengalami peningkatan ditahun 2030.

3. Kerjasama tersebut menjadi jembatan bagi Australia untuk memperkuat posisinya dikawasan Indo-Pasifik dan juga wilayah Samudra Hindia. Bagi kedua Negara, kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang strategis, dan oleh karna itu membangun hubungan politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan juga Samudra Hindia sangatlah diperlukan.

Keputusan Australia menjual uranium ke India membuat beberapa negara besar yang memiliki persenjataan nuklir di sekitar India seperti Cina dan Rusia menjadi was-was, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara substansial oleh Australia. Keputusan Australia ini akan mengubah dinamika geopolitik dan strategi beberapa negara, namun keputusan tersebut berkaitan dengan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia dan adanya peran sentral dari Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan Australia. Namun dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat dapat membantu agenda-agenda Australia untuk memperlambat hubungannya dengan India sebagai mitra keamanan yang menurut Australia saat ini adalah abadinya Asia, termasuk didalamnya hubungan pertahanan yang melibatkan India dan Jepang.

Dibawah pemerintahan Partai Buruh, Australia yang juga tergabung bersama kelompok Negara Pemasok Nuklir (NSG) mengajak seluruh anggota NSG untuk ikut serta mendukung program nuklir sipil India, dan dengan demikian akan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengekspor uranium secara legal ke India. Pada saat yang sama pemerintahan Partai Buruh berupaya mencegah India untuk mengimpor uranium selain dari Australia, agar Australia menjadi pemegang tunggal pasar uranium di India.

Daftar Pustaka

BUKU:

Budiardjo, Miriam. 1997. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Holsti, K.J. 1988. *“Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis”*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga

- Krisna, Didi. 1993, "*Kamus Politik Internasional*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Makar, Eugene M, "*An American's Guide to Doing Business in India*", 2007.
- Mas' oed, Mohtar (1990). "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*", edisi revisi, Jakarta: LP3ES
- Mattoo, Amitabh & Souresh Roy, "*India-Australia Relations in the Asian Century: Perspectives from India and Australia*", Manohar, New Delhi
- Moleong, Lexy J. 2004. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Reney, Austin Reney. 1958. "*Governing of Man*", New York: Hart and Winston Inc
- Rourke, John T. 2001. "*International Politics on The World Stage*", USA: University of Connecticut.
- Wannell, Emma, "*The Australian Climate Debate: Positioning Australia within an International Climate Change Context*", 2008, Australia: University of Canberra.
- West, Barbara A & Frances T. Murphy, "*A Brief History Of Australia*", Fact on File, 2010, hal. 32-33.
- Wild, John J., et.al, 2008. "*International Business: The Challenge of Globalization*". New Jersey : Pearson. Chapter 5.
- JURNAL:**
- Beeson, Mark, "*Issues in Australian Foreign Policy*", Australian Journal of Politics and History, Volume 60, Number 2, 2014, pp.265-278.
- Dowds, Talitha, Sharon Squassoni, 2012, "*The Last Domino to Fall: Australia, Uranium, and The India Deal*". CSIS (Center for Strategic & International Studies).
- Green, Jim, *Uranium, India And The Fracturing Nuclear Non-Poliferation Regime*, EnergyScience Coalition Briefing Paper No. 18 (revised), 2010.
- Medcalf, Rory. 2011. "*Australia's uranium puzzle: Why China and Russia but not India ?*", Melbourne: Australia India Institute
- Nuechterlein, Donald C. 1979. "*National Interest A New Approach*", Orbis, Spring
- Qinghai, Zhao, "*Australia-India Relations: A Strategic Partnership Yet to Mature*", CIIS, 2012.
- Sethna, H.N.Sethna. "*India's Atomic Energy Programme – Past and Future*", IAEA Bulletin – Vol 21, NO. 5.

WEBSITE:

- “Australia Cabut Larangan Ekspor Uranium ke India”, 2011, Tempo, terdapat pada <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/04/120369807/Australia-Cabut-Larangan-Ekspor-Uranium-ke-India>, diakses tanggal 15 Juli 2013 pukul 23.45 WIB.
- “Australia jual uranium ke India”, 2007, Tempo, terdapat pada <http://www.tempo.co/read/news/2007/08/15/059105640/Australia-Jual-Uranium-ke-India>, diakses tanggal 15 Juli 2013 pukul 22.35 WIB.
- “Australia pertimbangkan ekspor uranium ke India” terdapat pada <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/15/12422770/Australia.Pertimbangkan.Ekspor.Uranium.ke.India>, diakses tanggal 2 April 2014 pukul 23.45 WIB.
- “India dan Australia Mempererat Hubungan Pertahanan”, terdapat pada <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/06/20/india-australia-defense>, diakses pada tanggal 22 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.
- “Kevin Rudd Refuses to Buckle on Refusal to Sell Uranium to India”, terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/kevin-rudd-refuses-to-buckle-on-refusal-to-sell-uranium-to-india/story-e6frgczf-1225797003668>, diakses tanggal 3 April 2014 pada pukul 14.00 WIB.
- “No change in decision to supply uranium to India”, 2013, The Asian Age, terdapat pada <http://www.asianage.com/india/no-change-decision-supply-uranium-india-097>, diakses tanggal 1 Oktober 2013 pukul 19.30 WIB.
- Australian Uranium Association, ‘Facts about the uranium industry’, terdapat pada <http://www.auran.org.au/Content/Keyindustryfacts.aspx>, diakses tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.30 WIB.
- Bajpai, Nirupam, “Global Financial Crisis, its Impact on India and the Policy Response”, terdapat pada <http://globalcenters.columbia.edu/content/global-financial-crisis-its-impact-india-and-policy-response>, diakses tanggal 18 Oktober 2013 pukul 23.45 WIB.
- Fitrianto, Dahono, 2011, “Australia pertimbangkan ekspor uranium ke India”, Kompas, terdapat pada <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/15/12422770/Australia.Pertimbangkan.Ekspor.Uranium.ke.India>, diakses tanggal 15 Juli 2013 pukul 23.45 WIB.

- Franklin, Matthew, 2009, “Kevin Rudd Refuses to Buckle on Refusal to Sell Uranium to India”, The Australian, terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/kevin-rudd-refuses-to-buckle-on-refusal-to-sell-uranium-to-india/story-e6frgczf-1225797003668> , diakses tanggal 21 September 2013 pada pukul 14.00 WIB.
- Kevin Rudd Refuses to Buckle on Refusal to Sell Uranium to India”, terdapat pada <http://www.theaustralian.com.au/politics/kevin-rudd-refuses-to-buckle-on-refusal-to-sell-uranium-to-india/story-e6frgczf-1225797003668> , diakses tanggal 21 Mei 2014 pada pukul 14.00 WIB.
- No change in decision to supply uranium to India – The Asian Age”, terdapat pada <http://www.asianage.com/india/no-change-decision-supply-uranium-india-097>, diakses tanggal 22 Mei 2014 pukul 19.30 WIB.
- Singh, Sushil K, “India dan Australia Mempererat Hubungan Pertahanan”, 2013, Asia Pacific Defence Forum, terdapat pada <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/06/20/india-australia-defense>, diakses pada tanggal 22 September 2013 pukul 19.00 WIB.
- Stevenson, Hayley, *Australian Foreign Policy and the Challenge of Climate Change*. 2006. <<http://arts.monash.edu.au/psi/news-and-events/apsa/refereed-papers/international-relations/stevenson.pdf>> . Diakses pada tanggal 21 Mei 2014 Pukul 21.00 WIB.
- World Bank, terdapat pada <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>, diakses tanggal 15 Juli 2013 pukul 23.40 WIB.

PUBLIKASI PEMERINTAH:

- “Australia In The Asian Century Towards 2025”, Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, terdapat pada www.dfat.gov.au/issues/asian-century, diakses tanggal 19 Oktober 2013 pukul 13.15 WIB.
- “Australia’s History” terdapat pada <http://www.australia.com/about/culture-history/history.aspx>, diakses tanggal 14 November 2013 pukul 15.30 WIB.
- “Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement negotiations”, Australian government: Department of Foreign Affairs and Trade, terdapat pada <http://www.dfat.gov.au/fta/aifta/> , diakses tanggal

1 Februari 2014, pukul 17.00 WIB.

“*Geografi Australia*”, diakses dari <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/pengantar/>, pada tanggal 15 Juli 2013.

“*India Country Brief*”, Australian government: Department of Foreign Affairs and Trade, terdapat pada http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html, diakses tanggal 1 Februari 2014 pukul 17.00 WIB.

“*India Country Guide*”, hal. 14, terdapat pada http://www.hsbc.co.in/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/website/pdf/personal/india_country_guide.pdf, diakses tanggal 21 November 2013 pukul 15.00 WIB.

“*India-Australia Relations*”, The High Commission of India in Australia, terdapat pada http://www.hcindia-au.org/india_australia.html, diakses tanggal 11 Mei 2014 pukul 18.00 WIB.

“*Kehidupan di Australia*” hal. 17, terdapat pada <http://www.immi.gov.au/living-in-australia/values/book/translation/indonesian.pdf>, diakses tanggal 14 November 2013 pukul 16.30 WIB.

“*Lok Sabha*”, Lok Sabha House of The People, terdapat pada <http://loksabha.nic.in/>,

diakses tanggal 25 November 2013 Pukul 19.30 WIB

“*Population Clock*”, oleh Australian Bureau of Statistics, terdapat pada <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Web+Pages/Population+Clock?opendocument#from-banner=LN>, diakses tanggal 12 November 2013 pukul 09.00 WIB.

“*Recent Developments In Financial Market*”, Australian Bureau of Statistic, terdapat pada <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Article%20%20Recent%20developments%20in%20financial%20markets~271>, diakses tanggal 16 November 2013 pukul 14.00 WIB

Kedutaan Besar Australia-Indonesia, terdapat pada http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html, diakses tanggal 2 Januari 2014 pukul 16.45 WIB.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, terdapat pada <http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/CountryProfile.aspx>, diakses tanggal 2 Januari 2014 pukul 17.00 WIB.

Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi – India, terdapat pada <http://www.kemlu.go.id/newdelhi/Pages/Country>

Profile.aspx?IDP=2&l=i
d diakses tanggal 20
Agustus 2013 pukul
23.45 WIB.